

RENCANA AKSI (RENAKSI) AKIP TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH																						
NO	SASARAN STRATEGIS			TARGET KINERJA				PROGRAM			KEGIATAN				RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN	BUKTI EVIDENCE	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	15	
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3	25%	35%	65%	100%	Program pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Program pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Evaluasi dan penyelenggaraan Pemerintah	Nilai	3	Melaksanakan persiapan dengan penyusunan Surat Keputusan Gubernur terkait Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumsel, Melaksanakan sosialisasi, Bimbingan Teknis dan asistensi serta studi tiru terkait penyusunan LPPD Provinsi Sumsel dengan melibatkan Tim Kemendagri sebagai narasumber, Menyusun Surat Gubernur terkait permintaan pengumpulan bahan LPPD Provinsi Sumsel kepada Perangkat Daerah yang menjadi Tim Penyusun, Melaksanakan Rapat terkait Validasi Bahan yang telah dikumpul bersama Tim APIP Inspektorat Sumsel, Melaksanakan Penginputan bahan LPPD ke dalam website pengumpulan, Menyusun Buku LPPD Provinsi Sumsel, Melaksanakan Pencetakan Laporan menjadi Buku, Menyampaikan secara langsung Buku LPPD Provinsi Sumsel kepada Kementerian Dalam Negeri RI, Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel	√	√	√	√	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	https://drive.google.com/drive/folders/1KxijQHWE1bFtQ2HlWret3tuuVUZ3MgbwJ?usp=drive_link	
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	100%	25%	35%	65%	100%	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan 2. fasilitasi bantuan Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 5. Fasilitasi Penyelesaian masalah Hukum 6. Fasilitasi penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	%	100%	Melaksanakan Rancangan Pergub, Perda dan Surat Keputusan, Menyiapkan peraturan terkait, proses Pemeriksaan Pergub dan Perda, penginputan Pergub, Perda dan Surat Keputusan di Website				√	√	Biro Hukum	https://drive.google.com/drive/folders/179_xzj9wYsFWVBaX4Uufzan9f5BT_9XK?usp=sharing
3.	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)	12	25%	35%	65%	100%	Program Organisasi Penataan	Persentase Program Penataan Organisasi	100%	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	12	Melaksanakan Persiapan Pengumpulan Surat Pengumpulan Data setiap OPD , Penyusunan SK, Penunjukan Narasumber, Waktu Pelaksanaan Pengumpulan data per OPD, Waktu penginputan data diwebsite, waktu Pelaksanaan Bimtek , Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dari Pusat, Proses Perbaikan Laporan, Proses Pencetakan Laporan menjadi Buku	√	√	√	√	Biro Organisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1qzYtXdi_g75tp7y9ru75D7k8rrTVDqGh?usp=sharing	
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai	100%	25%	35%	65%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Kegiatan : 1. Fasilitasi Materi Dan Komunikasi Pimpinan 2. Fasilitasi Keprotokolan	Sub Kegiatan : 1. Penyiapan Materi Pimpinan 2. Sub Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 4. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 6. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	%	100%	1. Kegiatan KDH/WKDH yang di fasilitasi. 2. Kegiatan KDH/WKDH yang di Publikasi. 3. Kegiatan KDH/WKDH yang di Dokumentasi.	√	√	√	√	Biro Humas dan Protokol	https://drive.google.com/drive/folders/1kjoCpdHNGcTeDdxESD7IC-xqzcNrPoMm?usp=sharing	
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	25%	35%	65%	100%	Program Organisasi Penataan		100%	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan AKuntabilitas Kinerja	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks	A	Monitoring SKM Provinsi, Pengumpulan Data SKM dan SOP provinsi Sumsel	√	√	√	√	Biro Organisasi	https://drive.google.com/drive/folders/11puYDKwGCc9xyozUhgriWcMM1s_szVdv?usp=sharing	

5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Adminitrasi Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	100%	25%	35%	65%	100%	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	1. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 4. Analisi Capaian Kinerja Pembangunan 5. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 6. Fasilitasi Perumusan Kebijaka Teknis Pembangunan Daerah	%	100%	Pengumpulan Data Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik APBD, APBN DAK Fisik dan Non Fisik, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan serta Anggaran Kementerian / Lembaga.	√	√	√	√	Biro Administrasi Pembangunan	https://drive.google.com/drive/folders/1nzJLi-R9QwgVHJHtHg8zB7m4wCZDff?usp=drive_link
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	72	25%	35%	65%	100%	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Jumlah kegiatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM UKPBJ yang terfasilitasi 2. Jumlah kegiatan peningkatan kematangan UKPBJ yang terfasilitasi 3. Jumlah kegiatan pemanfaatan sistem pengadaan daerah yang terfasilitasi	Nilai	72	1. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM UKPBJ 2. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan peningkatan Kematangan UKPBJ 3. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sistem pengadaan daerah	√	√	√	√	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	https://drive.google.com/drive/folders/1FV7pR97xY9PEdY7scstVnT3_BfO7HDrV?usp=drive_link
7.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Jumlah pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi	2 Kecamatan	25%	35%	65%	100%	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Penataan Wilayah	Kecamatan	2 Kecamatan	Pengumpulan Data Pengajuan Pegusulan Kabupaten/Kota untuk pemekaran yang akan difasilitasi, Waktu Pemrosesan data yang akan diteliti			√	√	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	https://drive.google.com/drive/folders/1p82L6t5WBvSUGtdVDGsglGmjy8OCN3n?usp=drive_link
		Jumlah Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/ BUMN/ BUMD dan lembaga Non Pemerintah	15 MoU	25%	35%	65%	100%			100%	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	MoU	15 MoU	Persiapan Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi, Perispan Koordinasi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/ BUMD danLembaga Non Pemerintah			√	√	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	https://drive.google.com/drive/folders/1psmDC4yGtKc6VoX1thEMRI_mDhc0Egns?usp=sharing
8.	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	Persentase Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	100%	25%	35%	65%	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pendirian BUMD	%	100%	Melaksanakan Proses Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi , Melaksanakan Persiapan Perencanaan Program dan Kegiatan, Mengadakan Rapat antar sektor.	√	√	√	√	Biro Perekonomian	https://drive.google.com/drive/folders/1PxyARc8iP32_pkQAIEgydO1rYN47s6j
		Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi Kepada PAD	100%	25%	35%	65%	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	%	100%	Menyusun Daftar BUMD yang akan berkontribusi dan berkoordinasi kepada PAD	√	√	√	√	Biro Perekonomian	https://drive.google.com/drive/folders/1DS7vfyP3D9iHJS2C_gfA4xfmNmG6fabH
9.	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	Meningkatnya Peringkat MTQ	100%	25%	35%	65%	100%	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Program Kesejahteraan Rakyat	100%	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase	100%	Persiapan dan Koordinasi untuk ajang perlombaan ditingkat Provinsi, pengusulan daftar nama yang mengikuti perlombaan	√	√			Biro Kesejahteraan Rakyat	https://drive.google.com/drive/folders/1moPC-z940J39A2KKB4B2F5qkD634XYGJ?usp=drive_link
		Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	25%	35%	65%	100%	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Program Kesejahteraan Rakyat	100%	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 2. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	%	100%	Melakanakan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, Melaksanakan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual, Melaksanakan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dibidang Pendidikan		√		√	Biro Kesejahteraan Rakyat	https://drive.google.com/drive/folders/1moPC-z940J39A2KKB4B2F5qkD634XYGJ?usp=drive_link
10.	Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik	Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan	3 Perangkat Daerah	25%	35%	65%	100%	Program Organisasi Penataan	Persentase Program Penataan Organisasi	100%	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan	1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	PD	3 Perangkat Daerah	Melaksanakan Persiapan Kegiatan Fasilitasi, Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Menyiapkan Rapat Asistensi, Menyiapkan Materi diakhir TW4, Mencetak Dokumen	√	√	√	√	Biro Organisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1JlxlqgQ3-sNF342l4s_duJ8GX9ulr7a?usp=drive_link

		Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	80%	25%	35%	65%	100%	Program Penataan Organisasi	Persentase Program Penataan Organisasi	100%	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penataan Analisis Jabatan	%	80%	Mengumpulkan bahan-bahan kerja terkait dengan analisis jabatan dan beban kerja, standar kompetensi jabatan serta evaluasi jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengdanifikasi bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan,mengadakan rapat sesama OPD, mengumpulkan data anjab dan beban kerja, mencetak dokumen	√	√	√	√	Biro Organisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1E3asVGfnu0nDaQtLqYg8EjPgNxxdapu?usp=drive_link
		Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	70	25%	35%	65%	100%	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	Pelaksanaan Otonomi daerah	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	70	Melaksanakan persiapan dengan penyusunan Surat Keputusan Gubernur terkait Tim Penyusun Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumsel, Melaksanakan sosialisasi, Bimbingan Teknis dan asistensi serta studi tiru terkait penyusunan Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumsel dengan melibatkan Tim Kemendagri sebagai narasumber, Menyusun Surat Gubernur terkait permintaan pengumpulan bahan Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumsel kepada Perangkat Daerah yang menjadi Tim Penyusun, Melaksanakan Penyusunan Buku Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumsel, Melaksanakan Pencetakan Laporan menjadi Buku, Menyampaikan secara langsung Buku Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumsel kepada Kementerian Dalam Negeri RI, Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Capaian Penerapan SPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel	√	√	√	√	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	https://drive.google.com/drive/folders/1RpTF6TEeCXubdhKlIJHvF08z0ARbi0pu?usp=drive_link
		Persentase fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	100%	25%	35%	65%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Fasilitasi Administrasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100%	Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah, Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan kantor, melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	Biro Umum dan Perlengkapan	https://drive.google.com/drive/folders/1QWjIGWxemXuhgnd1SPwyODGNqmM_hpK?usp=drive_link

Palembang,
Seluruh Daerah,

Edward Candra

2025

